

RENCANA KERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA

KATA PENGANTAR

.Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Bangka ini. Rencana Kerja (Renja) BPBD merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra BPBD Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023.

Rencana kerja BPBD Kabupaten Bangka disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada renstra, RKPD, RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah.

Renja BPBD Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh BPBD. Selain itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di BPBD yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan yang direncanakan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Bangka, Agustus 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi,S.IP.
Pembina TK I/IVB
NIP. 19680602 198810 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka kegiatan dan kerangka anggaran. Penyusunan Rencana Kerja merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2019-2023 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bangka serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten Bangka untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menetapkan Renstra untuk kurun waktu 2019-2023, yaitu rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis, Kebijakan dan Program di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah melalui Rencana Kerja Satuan Operasional Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka, serta dengan memperhatikan potensi, kondisi, sosial budaya masyarakat dan tantangan serta peluang daerah dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Bertitik tolak kepada hal-hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang memuat berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka, disamping itu sebagai sarana dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bangka adalah :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
15. Peraturan Presiden No. 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan tertentu;
16. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
20. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023;
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas , Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka;
 26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Bangka yaitu sebagai acuan dan tolok ukur dalam pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Bangka tahun 2023 sesuai tugas, pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka ini adalah:

- a. Agar pelaksanaan perencanaan program/kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi.
- b. Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi dalam kegiatan penanggulangan bencana yang telah ditentukan baik dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada tahun 2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari satu sekretariat dan tiga Seksi. Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 s/d Tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2022 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.048.339.800,00. adapun dana tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.167.216.800,00. dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.881.183.000,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 2 program dan 9 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

TABEL 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6		7	8=(7-6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1 05 02 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	29.00	10,630,526,373	-	28.00	2,535,277,958	1,635,339,946	(899,938,012)	28.00	2,887,595,300	0.00	2599698149	24.45502751
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11.00		-	10.30			-	10.30		0.00		
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0.00		-	0.00			-	0.00		0.00		
		Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	74.00		-	70.00			-	70.00		0.00		
		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1.75		-	1.50			-	1.50		0.00		
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	75.00		-	70.00			-	70.00		0.00		
1 05 02 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	64,250,000	-	100	-	12,255,000	12,255,000	100	5,000,000	80.00	12255000	19.07392996
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100		-	100	17,000,000		(17,000,000)	100	5,000,000	55.00		
1 05 02 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	15	-	-	5	-	-	-	5	5,000,000	80.00	0	0

1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun (dokumen)	60	64,250,000	-	20	17,000,000	12,255,000	(4,745,000)	20	5,000,000	55.00	12255000	19.07392996
1	05	02	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	6,501,650,400	-	100	1,835,088,000	1,023,850,916	(811,237,084)	100	2,110,996,800	50.00	1652872252	25.42234895
							Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	100		-	100		-	-	100		50.00		
1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	6,501,650,400	-	12	1,835,088,000	1,023,850,916	(811,237,084)	12	2,110,996,800	50.00	1652872252	25.42234895
1	05	02	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun(laporan)	6		-	14	-	-	-	14	-	50.00	0	
1	05	02	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	20.00	163,832,000	-	6.67	-		-	6.67	-	0.00	0	0
							Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	100		-	100			-	100	9,800,000	0.00		
							Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100		-	100			-	100		0.00		
1	05	02	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia (paket)	50	132,932,000.00	-	1	-	-	-	1	-	0.00	0	0
							Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	50		-	16	-	-	-	16	9,800,000	0.00	9639000	
							Jumlah pakaian pawai adat yang tersedia (stel)	42		-	51	-	-	-	51	-	0.00	0	
1	05	02	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	12	30,900,000	-	2	-	-	-	2	-	0.00	0	0

1	05	02	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	711,590,900	-	100	99,760,500	76,443,620	(23,316,880)	100	71,932,000	50.00	105621920	14.84306784	
1	05	02	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	711,590,900	-	12	9,492,500	8,110,000	(1,382,500)	12	20,200,000	25.00	141100000	1.982880894
							Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani (bulan)	36		-	12	90,268,000	68,333,620	(21,934,380)	12	51,732,000	25.00	91511920	
1	05	02	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	330,512,800	-	100	66,354,600	54,102,500	(12,252,100)	100	-	50.00	54102500	16.36926013	
1	05	02	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	330,512,800	-	1	66,354,600	54,102,500	(12,252,100)	1	-	0.00	54102500	16.36926013
							Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	3		-	1	-	-	-	1	-	0.00	0	
1	05	02	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	1,706,134,973	-	100	354,908,180	331,777,910	(23,130,270)	100	479,406,500	50.00	555070027	32.53376994	
							Persentase Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (%)	100		-	100	-	-	-	100	-	50.00		
1	05	02	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani (bulan)	36	1,175,038,073	-	12	257,802,800	247,627,834	(10,174,966)	12	376,349,100	25.00	433592884	36.90032638
1	05	02	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik (bulan)	36	201,199,500	-	12	38,685,000	25,811,752	(12,873,248)	12	44,998,200	25.00	34271679	17.03368
1	05	02	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	329,897,400	-	12	58,420,380	58,338,324	(82,056)	12	58,059,200	25.00	87205464	26.43411679
1	05	02	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	1,152,555,300	-	100	162,166,678	136,910,000	(25,256,678)	100	205,460,000	50.00	219776450	19.06862517	
1	05	02	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah layanan kendaraan	18	978,164,800	-	6	150,556,600	134,820,000	(15,736,600)	6	196,340,000	100.00	217686450	22.25457817

					Kabupaten/Kota	Bencana 1 x 24 Jam (bulan)													
					Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengerahan TRC untuk proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang dilaksanakan (bulan)	36	100,000,000	-	12	-	12	-	50	0	0			
					Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana (bulan)	36	500,010,000	-	12	-	12	16,887,000	50	0	0			

TABEL 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN((RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB	BB (70.92)	BB	BB		BB		
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%		100%		
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	60 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Asset yang disusun sesuai standart	100%	100%	100%	100%	0	100%		

1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Aparatur yang Penilaian kerjanya baik	100%	100%	100%	100%	100%		
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Olahraga yang tersedia	126 Stel	42 Stel	42 Stel	42 Stel	42 Stel		
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Aparatur yang Penilaian kerjanya baik	100%	100%	100%	100%	100%		
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tertangani	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai Peraturan	100%	100%	100%	100%	100%		
1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang tertangani	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%		
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	36	12	12	12	12		
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5	3	3	3	3		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	60%	30%	40%	40%			
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%			
1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		

1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Simulasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	300 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	200 Orang		
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%		
1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pusdalops BPBD Kab. Bangka	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
1.05.03.2.02.08	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel TRC yang qualified	24 Personel TRC	24 Personel TRC	24 Personel TRC	24 Personel TRC	30 Personel TRC		
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Layanan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%		
1.05.03.2.03.02	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan TRC untuk proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan	125 kali	25 Kali	50 Kali		50 Kali		
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPBD menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.
2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi.
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi.
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, rawan kebakaran hutan dan kebakaran lahan, pemukiman penduduk serta kebakaran lainnya.
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam (Daerah) kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan dan penanganan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara garis besar hasil pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan resiko bencana tahun 2020 diketahui beberapa potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Bangka. Dengan potensi daerah terdiri dari areal hutan dan areal perkebunan sawit, serta areal pertambangan timah Kabupaten Bangka yang meliputi 8 (Delapan) Kecamatan yang mempunyai resiko bencana alam yaitu Angin Puting Beliung, Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit (Menular/ Tidak Menular), Gelombang Air Laut yang Ekstrim dan Abrasi Pantai, Konflik Sosial, Tanah Lonsor dan Banjir serta Kegagalan Teknologi.

Disamping itu potensi bencana juga disebabkan oleh faktor non alam seperti kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bangka menurut Data dan Informasi diketahui potensi bencana sebagai berikut :

a. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu kejadian bencana yang terjadi terutama saat musim kemarau di Kabupaten Bangka. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat. Kabut asap yang menyesakkan itu dipicu oleh kebakaran lahan yang dilatar belakangi pemanfaatan hutan/lahan atau masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan, diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin.

Berdasarkan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan di ketahui bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan hampir merata di seluruh wilayah kabupaten Bangka. Indeks bahaya kebakaran diseluruh wilayah Kabupaten Bangka walaupun rendah, namun tetap menjadi potensi ancaman terjadinya bencana di Kabupaten Bangka.

b. Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Bangka disebabkan curah hujan tinggi, rendahnya elevasi daerah yang sering dilanda banjir dan pembukaan lahan pertambangan timah yang cukup pesat yang mengakibatkan areal kawasan hutan sudah semakin berkurang sehingga rawan menimbulkan banjir, terutama musim penghujan bulan September sampai dengan bulan Desember, dimana intensitas curah hujan sangat tinggi.

Frekuensi kejadian banjir yang meningkat dewasa ini antara lain selain disebabkan faktor topografi dan iklim juga disebabkan semakin banyaknya alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan timah ilegal. Dan juga Banjir tersebut terjadi karena debit air yang masuk ke sungai atau bandar melebihi kapasitas sungai atau bandar untuk mengalirkannya, sehingga terjadi luapan. Selain itu,

untuk daerah pesisir pantai, adanya pasang air laut, mengakibatkan aliran air dari sungai bertahan dan meluap sebagai banjir.

c. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan salah satu bencana yang termasuk dalam Hazard Non SNI. Contoh bencana cuaca ekstrim adalah angin puting beliung dan gelombang ekstrim. Menurut peta rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka, terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Bangka memiliki indeks ancaman angin puting beliung yang tinggi. Sedangkan kejadian gelombang ekstrim dan abrasi menunjukkan indeks ancaman rendah sampai sedang.

d. Kekeringan

Wilayah Kabupten Bangka memiliki kawasan yang mempunyai potensi kekeringan. Ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi 3 kelas indek ancaman, yakni rendah, sedang, dan tinggi.

e. Epidemik (Zoonosis) dan Wabah Penyakit

Kabupaten Bangka termasuk kawasan yang rawan terhadap ancaman epidemic (zoonosis) dan wabah penyakit merujuk kepada komponen : kepadatan timbulnya malaria (KTM), kepadatan timbulnya HIV/AIDS (HIV/AIDS), kepadatan timbulnya campak (KTC), kepadatan timbulnya demam berdarah serta kepadatan penduduk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka memiliki indeks ancaman epidemik dan wabah penyakit yang rendah. Dalam hal ini indikator yang digunakan untuk peta bahaya bencana epidemic dan wabah penyakit adalah terjadinya kepadatan bahaya epidemic (malaria, demam berdarah, HIV/AIDS dan campak) dikombinasikan dengan kepadatan penduduk.

f. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menalami perubahan secara pesat. Konflik akan timbul akibat dari perlawanan mental sebagai akibat dari kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang berlawanan, atau tindakan yang berlawanan karena ketidakcocokan/ ketidakserasian, dan berkelahi, berperang, atau baku hantam yang pada dasarnya sumber utama terjadinya konflik atau pelaku manusia. Ketidakpuasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatism. Konflik sosial dapat terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, social budaya, ideologi, hankam dan hukum. di Kabupaten Bangka, dalam 2 dua) tahun terakhir ini banyak terjadi protes masyarakat terhadap pembukaan tambang timah. Kekurang berdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka, dalam

menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi.

Ketidakterdayaan masyarakat ini dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan. Kesenjangan dalam akses sumberdaya ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Bangka berpotensi menjadi sumber konflik sosial semacam itu.

g. Abrasi

Kawasan abrasi merupakan kawasan yang dalamnya memiliki potensial rawan Abrasi sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat disekitarnya. Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem tumbuhan pantai, besarnya energi gelombang laut selat Malaka dan karakteristik daratan pantai serta penyedotan pasir timah di lautan yang dekat dengan garis pantai.

Selain ancaman bencana alam yang tersebut di atas, di Kabupaten Bangka juga tercatat bencana non-alam yang terjadi, yaitu tenggelam dan orang diterkam buaya.

2..4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 maka RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 tetap menjadi pedoman utama.

Penalaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BPBD yang tercantum pada RKPD 2023;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap

sebelumnya;

3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan kegiatan BPBD yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di BPBD yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2023;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan BPBD antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan BPBD berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.4.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANGKA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.475.435.281,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.475.435.281,00	
			Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,27	8.000.000,00			Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27,27	8.000.000,00	
			Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,4				Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	10,4		
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</i>	1	8.000.000,00	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</i>	1	8.000.000,00	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	1				Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	1		

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungailiat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)	2.500.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungailiat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)	2.500.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	1.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	1.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	750.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	750.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungailiat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Dokumen LPPD)	750.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungailiat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Dokumen LPPD)	750.000,00	

	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungailiat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)	1.000.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungailiat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)	1.000.000,00	
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0	2.447.840.090,00			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	0	2.447.840.090,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	1	2.447.840.090,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	1	2.447.840.090,00	
			Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar	1				Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar	1		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungailiat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang (13 Laki-laki dan 0 Perempuan)	2.440.840.090,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungailiat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang (13 Laki-laki dan 0 Perempuan)	2.440.840.090,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungailiat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungailiat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1.000.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sungailiat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	46 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, 2 Dokumen Laporan Semesteran Hibah)	5.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sungailiat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	46 Dokumen (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, 2 Dokumen Laporan Semesteran Hibah)	5.000.000,00	

			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	76,76	87.222.000,00			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	76,76	87.222.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	0,3	87.222.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	0,3	87.222.000,00	
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	1				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	1		
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	1				Persentase aparatur yang berkinerja baik	1		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sungailiat	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	60.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sungailiat	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	60.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sungailiat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHK PN, KP4)	1.000.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sungailiat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHK PN, KP4)	1.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sungailiat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang (2 Laki-laki)	26.222.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sungailiat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang (2 Laki-laki)	26.222.000,00	
			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,22	141.870.000,00			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1,22	141.870.000,00	

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	1	141.870.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	1	141.870.000,00	
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 layanan				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 layanan		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	59.970.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	59.970.000,00	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	27.300.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	27.300.000,00	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	54.600.000,00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sungailiat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	54.600.000,00	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	71,1	790.503.191,00			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	71,1	790.503.191,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	1	80.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	1	80.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sungailiat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sungailiat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	20.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungailiat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	60.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungailiat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	60.000.000,00	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	1	460.868.800,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	1	460.868.800,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungailiat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	330.604.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungailiat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	330.604.600,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungailiat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	53.856.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungailiat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	53.856.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungailiat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	76.408.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungailiat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	76.408.200,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	1	249.634.391,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	1	249.634.391,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungailiat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit Mobil, 3 Unit Motor	168.034.391,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungailiat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit Mobil, 3 Unit Motor	168.034.391,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	66.300.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	66.300.000,00	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungailiat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.300.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungailiat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.300.000,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.533.001.500,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.533.001.500,00	
			Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0,4	1.533.001.500,00			Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0,4	1.533.001.500,00	
	<i>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Terlaksana</i>	<i>0,5</i>	<i>440.000.000,00</i>	<i>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Terlaksana</i>	<i>0,5</i>	<i>440.000.000,00</i>	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Bangka	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	385.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Bangka	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	385.000.000,00	
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200 Orang	55.000.000,00	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200 Orang	55.000.000,00	

	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	1.003.001.500,00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	1.003.001.500,00	
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	30.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sungailiat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasidan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	32.950.000,00	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sungailiat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasidan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	32.950.000,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Sungailiat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Personel	940.051.500,00	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Sungailiat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Personel	940.051.500,00	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Layanan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	1	74.500.000,00	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Layanan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	1	74.500.000,00	
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	20.000.000,00	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	20.000.000,00	

	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4 Orang	26.500.000,00	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4 Orang	26.500.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	28 Orang	28.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	28 Orang	28.000.000,00	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Terselenggaranya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,2	15.500.000,00	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Terselenggaranya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0,2	15.500.000,00	
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Bangka	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	15.500.000,00	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Bangka	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	15.500.000,00	

2.5. Penelahaan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada Bupati saat kunjungan ke lapangan, aspirasi melalui hasil Reses DPRD, dll.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
BPBD Kabupaten Bangka

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Hidrant dan Pompa Air Pemadam Kebakaran	Jl.Cendrawasih, Sungailiat, Kab. Bangka	Jumlah hydrant dan pompa air yang diadakan	1 Paket	Dewan dalam musrenbang
2	Pengadaan Hidrant dan Pompa Air Pemadam Kebakaran	Cengkong Abang, Kab. Bangka, Mendo Barat, Cengkong Abang	Jumlah hydrant dan pompa air yang diadakan	10 buah	Dewan dalam musrenbang
3	pelatihan penanganan kebakaran khusus desa rawa-rawa	Dusun Lubuk Lesung Rt 009, Kab. Bangka	Jumlah masyarakat yang terlatih	1 kegiatan	Dewan dalam musrenbang

Seiring dengan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Bangka membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka antara lain melalui SMS, website, media social (twitter, facebook, instagram, dll). Selain ditingkat pemerintah provinsi, BPBD Kabupaten Bangka juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, tanggap.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Dalam upaya mencapai agenda pembangunan yang telah disusun dalam RPJMN 2020-2024, khususnya yang dijabarkan dalam tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dalam Prioritas Nasional 6 serta RKP nasional yaitu Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Maka tugas BPBD sebagai subordinat dari BNPB mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya Prioritas tersebut.

Oleh karena itu, visi BNPB sejalan untuk mendukung visi Presiden tahun 2020-2024: Visi BNPB 2020-2024 adalah: “BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong” RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik dan lebih aman pada pascabencana.

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.

3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayahterdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Strategi BNPB 2020-2024 diarahkan untuk Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan potensi Sumber Daya alam dalam posisi strategis wilayah, Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang merupakan Visi Kepala daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah.

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Bangka sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Bangka lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Bangka terpilih (2019-2023), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju Kabupaten Bangka lebih sejahtera, dan lebih mulia sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Bangka periode 2019-2023.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bangka saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2019-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Bangka adalah "BANGKA SETARA ". Bangka Setara tersebut terdiri dari 2 (dua) kata kunci yaitu Bangka dan Setara. Kata Bangka merefleksikan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka yaitu unsur masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah . Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia.

Kata Sejahtera merefleksikan suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bangka yang terpenuhi Kebutuhan Materil dan Spirituil yang ditunjukkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tinggi. Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

Kata Mulia merefleksikan suatu kondisi masyarakat yang Memiliki Harkat dan Martabat serta Kedudukan yang Setara/Mulia/Tinggi Karena Keberhasilan dalam Pencapaian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang Ideal. Masyarakat yang Mulia Memiliki Kemampuan dan Membentuk Karakter serta Peradaban yang Bermartabat dan Unggul dalam Menjadi Manusia yang Sehat, Berilmu Pengetahuan, Cakap, Kreatif dan Mandiri.

Adapun Misi pembangunan Kabupaten Bangka untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional.
5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Mengacu pada kenyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kabupaten Bangka dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan Taraf pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Pembangunan sektor Pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

5. Meningkatkan Produktivitas Pertanian dalam Mendorong Perekonomian.
6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
7. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Misi dalam mewujudkan visi Kabupaten Bangka pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekan manajemen resiko bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dimana upaya pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bangka seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Bangka, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka, maka Pemerintah Kabupaten Bangka membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - Kepala Pelaksana;
 - Sekretariat,
 - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
 - Seksi Kedaruratan dan Logistik,
 - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 55 Tahun 2018

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat

tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara integrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja;
 2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program penanggulangan bencana; dan
 3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.
 - b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
 4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.
- c. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat pasca bencana.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra BPBD. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja BPBD Kabupaten Bangka tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL.3.1.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023
1	Membaiknya Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %
		Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	20 %

TABEL.3.1.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.475.435.281,00				3.971.035.049,00
		Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		27,27	8.000.000,00			24,80	8.500.000,00
		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		10,4				10,75	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar		100%	8.000.000,00		P1	100%	8.500.000,00

		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar		100%				100%	
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Renstra, Perkin, Perkin Perubahan, Rencana Aksi)	2.500.000,00
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen (1 Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Notulen Rapat, GAP dan GBS, Analisis Resiko dan TOR RKA))	1.000.000,00
1.05.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00
1.05.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00
1.05.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangka	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	750.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Notulen Rapat))	1.000.000,00

1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	4 Laporan (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Dokumen LPPD)	750.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Laporan (1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, 1 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah, 1 Dokumen LPPD)	1.000.000,00
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	8 Laporan (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	8 Laporan (4 Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah, 4 Dokumen Evaluasi Rencana Aksi)	1.000.000,00
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		0%	2.447.840.090,00			0%	2.691.924.099,00
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		100%	2.447.840.090,00			100%	2.691.924.099,00
		Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	13 Orang/bulan (13 Laki-laki dan 0 Perempuan)	2.440.840.090,00	Dana Alokasi Umum	P1	13 Orang/bulan (13 Laki-laki dan 0 Perempuan)	2.684.924.099,00
1.05.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	12 Dokumen	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	1.000.000,00
1.05.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka	2 Laporan (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Laporan (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	1.000.000,00

1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bangka	46 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, 2 Dokumen Laporan Semesteran Hibah)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	46 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, 2 Dokumen Laporan Semesteran Hibah)	5.000.000,00
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah		76,76	87.222.000,00			76,76	123.470.000,00
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi		30%	87.222.000,00			30%	123.470.000,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%				100%	
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Bangka	1 Paket	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P2	1 Paket	74.970.000,00
1.05.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)	1.000.000,00
1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangka dan Luar Daerah	2 Orang (2 Laki-laki)	26.222.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Orang (2 Laki-laki)	47.500.000,00

		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		1,22	141.870.000,00			1,22	170.000.000,00
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	141.870.000,00		P1	100%	170.000.000,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3 layanan			P1	3 layanan	
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Laporan	59.970.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	75.000.000,00
1.05.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	27.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	30.000.000,00
1.05.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka dan Luar Daerah	12 Dokumen	54.600.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	65.000.000,00
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		71,10	790.503.191,00			71,10	977.140.950,00
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Sungailiat	100%	80.000.000,00		P1	100%	100.625.000,00
1.05.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bangka	1 Paket	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P2	1 paket	50.000.000,00
1.05.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangka	15 Unit	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P2	15 Unit	50.625.000,00
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Sungailiat	100%	460.868.800,00			100%	576.924.680,00

1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Laporan	330.604.600,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	433.634.060,00
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Laporan	53.856.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	59.241.600,00
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Laporan	76.408.200,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	84.049.020,00
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Sungailiat	100%	249.634.391,00		P1	100%	299.591.270,00
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	3 Unit Mobil, 3 Unit Motor	168.034.391,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Unit Mobil, 3 Unit Motor	201.641.270,00
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	12 Unit	66.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Unit	75.000.000,00
1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	1 Unit	15.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P2	1 Unit	22.950.000,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.533.001.500,00				1.711.177.250,00
		Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah		60,00%	1.533.001.500,00			60,00%	1.711.177.250,00
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Terlaksana		50,00%	440.000.000,00		P1	100%	115.000.000,00

1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Bangka	1 Dokumen	385.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	30.000.000,00
1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kab. Bangka	200 Orang	55.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P2	200 Orang	85.000.000,00
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	1.003.001.500,00		P1	100%	1.394.577.250,00
1.05.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Bangka	50 Orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P2	50 Orang	60.000.000,00
1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasional Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	12 Dokumen	32.950.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P1	12 Dokumen	55.000.000,00
1.05.03.2.02.08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Bangka	30 Personel	940.051.500,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P1	30 Personel	1.279.577.250,00

1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten		100%	74.500.000,00		P1	100%	151.600.000,00
1.05.03.2.03.02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Bangka	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	45.000.000,00
1.05.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Bangka	4 Orang	26.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P1	4 Orang	58.600.000,00
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bangka	28 Orang	28.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P1	28 Orang	48.000.000,00
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terselenggaranya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		20%	15.500.000,00		P1	100%	50.000.000,00
1.05.03.2.04.03	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Bangka	3 Dokumen	15.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	P2	3 Dokumen	50.000.000,00
JUMLAH					5.008.436.781,00				5.682.212.299,00

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Bangka.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menetapkan program - program nya sesuai RPJMD periode 2019-2023, yaitu;

1. Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan ;
2. Program pendukung; program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik , maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Bangka yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor: 050-5899 Tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran ke lima RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

I PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

BPBD Kabupaten Bangka termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu Meningkatkan Upaya Penanganan Bencana, maka BPBD Kabupaten Bangka wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Bangka.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2019-2023 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Bangka, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi OPD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD, diukur dari :

1. Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2019-2023; dan
2. Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2019- 2023.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di Daerah rawan bencana, SKPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, para aparatur pemerintahan daerah, dan Relawan Bencana.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya

berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1.1

TABEL 4.1.1

RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5.008.436.781				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.475.435.281				
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000				
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	6 Dokumen		2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	5 Dokumen		1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	2 Dokumen		1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	2 Dokumen		1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	2 Dokumen		750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	4 Dokumen		750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	27.27 Indeks	8 Laporan		1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.447.840.090		
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	0 Persen	13 Orang	100 Persen	2.440.840.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	0 Persen	12 Dokumen	100 Persen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	0 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	0 Persen	54 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							87.222.000		
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Profesionalisme Aparatur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Profesionalisme Aparatur	Kab. Bangka, Sungailiat,	76.76 Indeks	1 Paket	76.76 Indeks	60.000.000	Dana Transfer Umum-

						Lingkup Perangkat Daerah		Lingkup Perangkat Daerah	Bukit Betung					Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	76.76 Indeks	11 Dokumen	76.76 Indeks	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.76 Indeks	2 Orang	76.76 Indeks	26.222.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								141.870.000	
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Tata Laksana Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Tata Laksana Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Indeks	12 Dokumen	2 Indeks	59.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Tata Laksana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Tata Laksana Perangkat Daerah	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	2 Indeks	12 Dokumen	2 Indeks	27.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Tata Laksana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Tata Laksana Perangkat Daerah	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	2 Indeks	12 Dokumen	2 Indeks	54.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								80.000.000	
1	05	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.10 Indeks	1 Paket	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.10 Indeks	15 Unit	100 Persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								460.868.800	

1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.10 Indeks	12 Dokumen	71.1 Indeks	330.604.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.10 Indeks	12 Dokumen	71.1 Indeks	53.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.10 Indeks	12 Dokumen	71.1 Indeks	76.408.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							249.634.391		
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.1 Indeks	6 Unit	100 Persen	168.034.391	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.1 Indeks	12 Unit	100 Persen	66.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	71.1 Indeks	1 Unit	100 Persen	15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1.533.001.500		
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							440.000.000		
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	05	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	60 Indeks	1 Dokumen	100 Persen	385.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	60 Indeks	200 Orang	100 Persen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							1.003.001.500		
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	60 Indeks	80 Orang	100 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	60 Indeks	12 Dokumen	100 Persen	32.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	160 Indeks	30 Orang	100 Persen	940.051.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							74.500.000		
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Persentase Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Indeks	1 Dokumen	100 Persen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 Indeks	0 Orang	100 Persen	26.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Indeks	28 Orang	100 Persen	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							15.500.000		
1	05	03	2,04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Indeks	3 Dokumen	20 Persen	15.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												TOTAL	5.008.436.781	

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Renja ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politik yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2023;
2. Dengan ditetapkannya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan bencana terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada Tahun 2023

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Keberhasilan dari pelaksanaan Renja ini beserta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi setiap tahun.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dibuat untuk pedoman kerja pada tahun 2023.

Bangka, Agustus 2022
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka

Mohd. Nursi, S.IP.
Pembina TK I/IVB
NIP. 19680602 198810 1 001